

Tinjauan yuridis terhadap kekuatan hukum akta perjanjian pernikahan yang terlambat disahkan melalui penetapan pengadilan negeri berkaitan pengoperan hak atas saham antara suami isteri : analisis Akta Perjanjian Pernikahan tanggal 16 Nopember 1981, Nomor 27, dibuat dihadapan Notaris X, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. XYZ, tanggal 30 Maret 2001, Nomor 63, dibuat dihadapan Notaris Y

Jeannette Lesmana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20329251&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pasal 29 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mewajibkan penyampaian laporan adanya perjanjian perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai syarat mengikat dan berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan, namun dalam kenyataannya ditemukan akta Perjanjian Perkawinan yang terlambat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Disamping itu ditemukan pula Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang menyatakan terdapat pengoperan hak-hak atas saham suami dan isteri dalam keadaan Akta Perjanjian Perkawinan mereka belum disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan adanya penyimpangan tersebut, maka terdapat ancaman pembatalan atas akta Perjanjian Perkawinan dan pengoperan hak-hak atas saham tersebut.

ABSTRACT

Article 29 (1), Law of Republic of Indonesia No 1 of 1974, obliges the delivery report to the Officer of the Civil Registry Office as binding conditions and the occurrence of Prenuptial Agreement for the third parties, at the time of or before the marriage take place, but in fact there is a Prenuptial Agreement that late to be reported and verified by the Officer of the Civil Registry Office. Beside that, there is a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which stated there was transfer of rights of the shares between husband and wife in the condition that their Prenuptial Agreement has not been verified by the Officer of the Civil Registry Office. With deviation described above mention, then there is threat of nullification on the Prenuptial Agreement and transfer the rights of the shares.